



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARMAJI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PRODUKSI MEDIA**
3. NHK : **910678**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.281 m2/1.281 m2 di KAB / KOTA
KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KATANA JIMNY SJ410 Tahun 1981, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, VESPA VBB 1965 Tahun 1965, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT 1974 Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.065.441

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 484.565.441

III. HUTANG Rp. 600.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -115.434.559



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.